Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

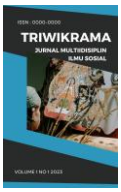

BANTUAN SOSIAL DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DI KOTA MEDAN

Grace Claudia Valerina Saragih, Kevin Cornelius Manurung, Nazwa Clarissa, Peter Patiangbanua Purba, Rendi Jonatan Lumbangaol, Suci Rohani Br Panjaitan, Ramsul Nababan, S.H.,M.H.

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

ARTICLE INFO

Article history:
Received April, 2025
Revised April, 2025
Accepted April, 2025
Available April, 2025

Email:
erinsaragih17@gmail.com,
kevincornelius52@gmail.com,
nazwaclarissa947@gmail.com,
peterpurba662@gmail.com,
rendilumbangaol2@gmail.com,
sucipanjaitan24@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian yang penulis angkat berjudul BANTUAN SOSIAL DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DI KOTA MEDAN. Keadilan sosial adalah konsep yang mendasar dalam masyarakat yang adil dan seimbang. Keadilan sosial merupakan prinsip dasar dalam Pembangunan berkelanjutan, di mana setidap individu berhak mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan motedo kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program bantuan sosial (bansos) di Kota Medan telah memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin. Program bantuan sosial (bansos) dia Kota Medan telah memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin. Program bansos di Kota Medan telah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi sumber daya. Namun, tantangan struktural seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menghambat optimalisasi program.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Keadilan Sosial, Program Pemerintah

Abstract

The research that the author raised is entitled SOCIAL ASSISTANCE IN CREATING SOCIAL JUSTICE THROUGH GOVERNMENT PROGRAMS IN MEDAN CITY. Social justice is a fundamental concept in a just and balanced society. Social justice is a basic principle in Sustainable Development, where every individual has the right to access economic resources and social protection. This study uses a qualitative method where researchers collect data through observation, interviews, and documentation. The social assistance program (bansos) in Medan City has had a positive impact in efforts to realize social justice for the poor. The social assistance program (bansos) in Medan City has had a positive impact in efforts to realize social justice for the poor. The bansos program in Medan City has attempted to reduce economic disparities through resource redistribution. However, structural challenges such as complicated bureaucracy and lack of community participation in supervision hinder the optimization of the program.

Keywords: *Social Assistance, Social Justice, Government Programs*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

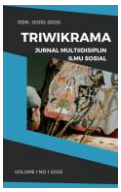

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pemerataan kesejahteraan. Data BPS (2024) menunjukkan terdapat sebesar 7,94 persen penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Medan. Persentase ini menurun 0,06 poin jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 8 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi kota Medan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen (y-on-y). Fenomena ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang efekti, salah satunya melalui program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial.

Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), secara positif hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan kesamaan hak pada manusia sebagaimana memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama (Tunisa, Asbari, Ahsyan, & Utami , 2024). Keadilan sosial adalah konsep yang mendasar dalam masyarakat yang adil dan seimbang. Konsep ini menekankan penghapusan disparitas sosial, ekonomi, dan politik serta pemberian hak yang sama kepada semua individu. Keadilan sosial merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis (Ihsanniati, Ramadhan, Thobroni, Yaqin, & Qisom, 2024).

Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang tercermin dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial merupakan prinsip dasar dalam Pembangunan berkelanjutan, di mana setidap individu berhak mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan sosial. stitusi pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan program-programnya guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Lembaga eksekutif, seperti kementerian dan lembaga pemerintahan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial (Ningsih, Dara, Hasanah, & Putri, 2023). Pemerintah Kota khususnya pemerintah kota Medan telah meluncurkan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Medan Sejahtera, sebagai upaya redistribusi sumber daya.

Namun, implementasinya kerap dipertanyakan karena ketidakmerataan distribusi, ketidakakuratan data penerima, dan minimnya transparansi. Hal ini berpotensi memperburuk ketidakadilan struktural jika tidak ditangani secara sistematis.

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Rahmansyah, Qadri , Sakti, & Ikhsan, 2020).

Ketepatan sasaran program bantuan sosial sangat berdampak bagi masyarakat, terlebih masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat miskin. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Amarosi, Purnamasari, & Rahman, 2022). Penelitian yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar" yang ditulis oleh Winarta,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

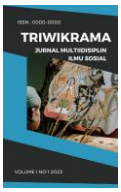

I, W, T., dkk (2020) mengatakan bahwa kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Gianyar masih belum efektif, hal ini di lihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial. Ketepat sasaran dana bansos ini juga masih dapat dikatakan kurang tepat, karena masih banyak masyarakat ataupun kelompok yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali hal ini terjadi kurangnya data sebagai informasi untuk memberikan Bansos tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana Bansos masih belum tepat di Kabupaten Gianyar, penelitian yang penulis lakukan memliki perbedaan pada lokasi yang akan penulis teliti. Penulis akan meneliti di lokasi Kota Medan.

Oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana bantuan sosial dalam menciptakan keadilan sosial melalui program pemerintah di Kota Medan. Penulis berharap hasil penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan penulis berharap penelitian yang penulis lakukan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan penerimaan bantuan sosial agar terciptanya keadilan sosial di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Adapun tempat penelitian yang kami lakukan yaitu di Kel Sidorejo Hilir, Kec Medan Tembung adapun waktu penelitian kami laksanakan pada tanggal 7 maret sampai 10 maret 2025. subjek Mini riset yang kami buat yakni masyarakat kelas bawah yang mendapatkan bantuan sosial.

Menurut Arikunto (2012) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya (Nurjanah, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi
   Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).
2. Wawancara
   Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain. Berhubungan dengan masalah penelitian, alam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

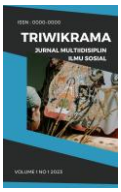

Menurut Ulber Silalahi kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis." (Nurdewi, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bantuan Sosial dalam Perspektif Keadilan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam Islam, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Istikomah (2023) menjelaskan bahwa lembaga zakat dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial dengan menyalurkan dana kepada kelompok yang membutuhkan (Istikomah 2023). Di sisi lain, dalam perspektif Kristen, Pardede (2022) menekankan bahwa gereja memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan bantuan bagi kelompok yang rentan (Pardede, 2022).

Dalam pelaksanaan bantuan sosial, prinsip utama yang harus diterapkan adalah kesetaraan, solidaritas, keberlanjutan, serta transparansi. Prinsip kesetaraan mengacu pada hak setiap individu untuk mendapatkan bantuan tanpa diskriminasi, di mana distribusi zakat harus dilakukan secara adil agar sampai kepada yang benar-benar membutuhkan (Istikomah, 2023). Keberlanjutan dalam program bantuan sosial juga menjadi perhatian penting. Bantuan tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar sementara, tetapi juga harus mampu mendorong penerima agar mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi perlu dikembangkan agar bantuan tidak menciptakan ketergantungan Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi faktor krusial agar masyarakat percaya terhadap sistem yang diterapkan. Bahwa kurangnya transparansi dalam lembaga zakat dapat menghambat efektivitas distribusi bantuan sosial dan menurunkan kepercayaan publik (Istikomah, 2023).

Dalam memahami bantuan sosial dari perspektif keadilan sosial, beberapa teori dapat dijadikan sebagai landasan analisis. Karl Marx berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi terjadi akibat sistem kapitalisme yang tidak adil, sehingga redistribusi kekayaan melalui bantuan sosial menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah (Pardede, 2022). Sementara itu, Emile Durkheim melihat bantuan sosial sebagai bentuk solidaritas sosial yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Solidaritas mekanis dan organik dalam teorinya menunjukkan bahwa masyarakat dapat tetap stabil jika mereka saling membantu, terutama dalam situasi krisis ekonomi (Pardede, 2022). Dari perspektif yang lebih modern, John Rawls mengusulkan bahwa keadilan sosial harus menjamin kesejahteraan bagi kelompok yang paling rentan di masyarakat. Dalam hal ini, bantuan sosial berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan hidup yang layak (Istikomah, 2023).

3.2 Bantuan Sosial dalam Kebijakan Pemerintah

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan "bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial". Sehingga program Bantuan Sosial

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

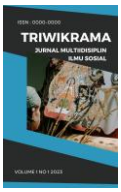

ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai (Salsabila & dkk, 2024)

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan meluncurkan Program Bantuan Sosial (BANSOS). Adapun jenis Program Bantuan Sosial yang diadakan pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, dan PIP.

Bantuan sosial reguler dan khusus adalah dua jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang mengelola Kemensos. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako adalah bantuan sosial umum. Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), juga merupakan bantuan sosial lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang yang mengatur sistem jaminan sosial nasional (SISN) (Ariyani & Sarwandianto, 2025)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali

Implementasi Bantuan Sosial di Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan selaku bidang kesejahteraan sosial sudah melakukan berbagai upaya melalui program-program yang ada dalam mengatasi permasalahan anak terlantar yang ada di Kecamatan Medan Helvetia. Dinas Sosial Kota Medan memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak terlantar yang ada dan melakukan pendataan terhadap anak terlantar tersebut. Hal ini di wujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak terlantar seperti memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap anak terlantar (Khairunnisa, 2024)

Pemerintah Kota Medan memiliki beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang didukung oleh bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu. Pemerintah Kota Medan juga membantu para pelaku UMKM dengan memberikan berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan kewirausahaan. Untuk menanggulangi pengangguran di Kota Medan yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Inovasi Ketenagakerjaan Terpadu (SIDUTA). Dengan memberikan kesempatan yang layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, maka dapat dilakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan (Amelia, Oktarahmadini, & Harahap, 2025).

Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan. Dilihat dari berbagi faktor penunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Medan sudah mengimplementasikan dengan baik. Meskipun terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan seperti kesalahpahaman penyampaian informasi kepada atau belum langsung paham masyarakat atas informasi yang diterima (Selviana & Nalar, 2023)

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

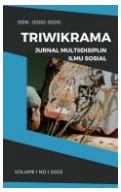

Dampak Bantuan Sosial terhadap Keadilan Sosial di Kota Medan

Dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, bantuan sosial berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Bantuan sosial yang disalurkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbukti membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. DTKS digunakan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin di Kota Medan, khususnya di Kelurahan Simpang Selayang (Sembiring & Nababan, 2024).

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Penelitian Hasibuan (2022) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Medan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan. Bantuan tersebut juga membantu mengurangi dampak ekonomi akibat meningkatnya angka pengangguran selama pandemi. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendistribusiannya (Hasibuan, 2022).

Meskipun bantuan sosial memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan data penerima manfaat yang sering kali menyebabkan bantuan tidak sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, bantuan sosial justru menimbulkan kecemburuan sosial akibat ketidaktepatan distribusi. Hasibuan (2022) menemukan bahwa selama penyaluran bantuan sosial di masa pandemi, banyak kasus di mana masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak menerima bantuan karena kesalahan dalam pendataan. Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan sosial juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program ini (Hasibuan 2022).

Gambaran Hasil Mini Riset/Survey

Mini riset yang penulis angkat dilaksanakan di wilayah tempat tinggal penerima bantuan sosial di Wilayah Kota Medan. Dimana mayoritas masyarakat mengatakan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bantuan sosial yang di terima masyarakat tersebut meliputi bantuan sosial PKH, dan BPNT. Bantuan sosial tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarkat di wiliyah tersebut. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan proses distribusi yang tidak merata dan keterlambatan penyaluran.

Pembahasan

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan meluncurkan Program Bantuan Sosial (BANSOS). Adapun jenis Program Bantuan Sosial yang diadakan pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, dan PIP. Dalam implementasinya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

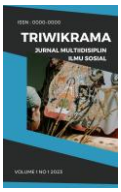

terdapat masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan sosial, namun masyarakat tersebut tidak mendapatkannya. Seperti yang terdepat di wilayah Kel Sidorejo Hilir, Kec Medan Tembung. Untuk itu penulis akan membahas lebih dalam mengenai efektivitas program bantuan sosial di wiliyah kota Medan.

Efektivitas program bantuan sosial pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin

Program Bantuan sosial merupakan suatu kebijakan yang di buat pemerintah dalan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan tersebut diberlakukan di setiap desa, kota, dan provinsi yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Salah satu kota yang melaksanakan kebijakan tersebut ialah Kota Medan. Bantuan sosial yang berlaku di Kota Medan sangat beragam, hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, terlebih masyarakat miskin. Pada penelitian yang penulis angkat mengatakan bahwa program bantuan sosial yang di berlakukan di Kota Medan sudah efektiv. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa program bantuan sosial pemerintah kota Medan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Masyarakat kota Medan mengatakan bahwa bantuan sosial dinyatakan cukup untuk membantu masyarakat, seperti membantu anak sekolah, Namun dalam kebutuhan sehari-hari masih dinyatakan tidak cukup. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah meliputi bantuan tunai, bantuan beras. Namun bantuan tersebut masih belum mencukupi untuk biaya dan kebutuhan sehari-hari. Hasil wawancara juga mengatakan bahwa sosialisasi dan informasi mengenai bantuan sosial juga masih terbilang mudah untuk di dapat dan masyarakat juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial sangat mudah. Persyaratan yang diperlukan hanya data diri seperti KTP, dan KK kemudian di bawa ke kantor lurah.

Efektivitas program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran dan merata bagi masyarakat kurang mampu di Kota Medan

Program bantuan sosial dijalankan oleh pemerintahan, pemerintahan pusat mengeluarkan anggaran dan di berikan kepada setiap pemerintahan di daerah guna untuk menjalankan program bantuan sosial tersebut. Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah daerah dibantu oleh aparatur sipil negara yang salah satunya sekdes ataupun lurah. Permasalahan sering terjadi Ketika pendistribusian bantuan sosial oleh pemerintah. Pendistribusian bantuan sosial masih sering di pertanyakan masyarakat mengenai ketepat sasaran dan kemerataan distribusi bantuan sosial tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarkat yang ada di kota Medan berpendapat bahwa bantuan sosial ini masih belum merata dan tepat sasaran dalam pendistribusian kepada masyarakat kurang mampu. Masih banyak masyarakat yang berada di sekitar wilayah kota Medan yang seharusnya layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, namun masyarakat tersebut tidak mendapatkannya. Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa faktor lain juga dapat mempengaruhi pendistribusian bantuan sosial. Faktor lain tersebut adalah adanya kesenjangan di lingkungan masyarakat sekitar. Namun meskipun begitu, beberapa masyarakat mengatakan bahwa pendistribusian yang dilakukan sudah adil dan tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program bantuan sosial (bansos) di Kota Medan telah memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin. Mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan seperti PKH, BPNT, dan bantuan tunai membantu memenuhi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 7, Number 12 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

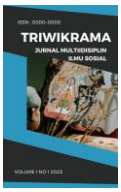

kebutuhan dasar, terutama dalam bidang pendidikan dan pangan. Namun, efektivitas program ini masih terhambat oleh beberapa faktor kritis. Pertama, ketidakmerataan distribusi dan ketidakakuratan data penerima menyebabkan sebagian masyarakat yang memenuhi kriteria belum terjangkau. Kedua, minimnya transparansi dalam proses penyaluran dan keterlambatan distribusi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Selain itu, meskipun sosialisasi dianggap mudah diakses, masih terdapat masyarakat yang kurang informasi tentang prosedur pendaftaran bansos.

Dari perspektif keadilan sosial, program bansos di Kota Medan telah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi sumber daya. Namun, tantangan struktural seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menghambat optimalisasi program. Dengan demikian, meskipun program ini memiliki tujuan mulia, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjamin distribusi yang tepat sasaran dan merata.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial di Kota Medan, penulis memberikan beberapa rekomendasi:

1. Perbaikan Sistem Pendataan: Pemerintah perlu memperkuat basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kesalahan dan duplikasi data penerima.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Proses distribusi bansos harus dilakukan secara terbuka, termasuk publikasi daftar penerima dan alokasi dana di tingkat kelurahan. Pelibatan lembaga independen atau masyarakat dalam audit dapat meningkatkan akuntabilitas.
3. Sosialisasi Intensif: Sosialisasi program bansos perlu diperluas melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti media sosial, pos pelayanan terpadu, atau kerja sama dengan tokoh masyarakat. Informasi tentang syarat, prosedur, dan jadwal penyaluran harus disampaikan secara jelas.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan distribusi bansos, misalnya melalui pembentukan forum warga atau kanal pengaduan. Hal ini dapat mencegah praktik nepotisme dan meningkatkan kepercayaan publik.
5. Integrasi Program Pemberdayaan bantuan sosial sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diikuti dengan program pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pendampingan UMKM untuk menciptakan kemandirian ekonomi penerima

DAFTAR PUSTAKA

Amarosi, C., Purnamasari, H., & Rahman. (2022). Efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 6(4), 344–352.

Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP), 3(2), 147–153.

Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 1–23.

Ariyani, L., & Sarwandianto, A. (2025). Penerapan platform informasi pelayanan data terpadu kesejahteraan sosial. Jurnal Kabar Masyarakat, 5(2), 217–223.

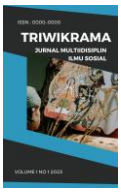

Hasibuan, B. P. (2022). Peran Dinas Sosial Kota Medan dalam menyalurkan bantuan. Jurnal Governance Opinion, 4(1), 14.

Ihsanniati, N. S., Ramadhan, M. N., Thobroni, A. Y., Yaqin, A. A., & Qisom, S. (2024). Keadilan sosial: Konsep keadilan dan peran manusia dalam mewujudkan keadilan perspektif Al-Qur'an. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir, 5(2), 181–191.

Istikomah. (2023). Dinamika lembaga zakat dalam masyarakat: Perspektif sosiologi. Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, 2(1), 24.

Khairunnisa, S. D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Medan Helvetia. Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 3(1), 59–69.

Ningsih, J. R., Dara, F. L., Hasanah, S. M., & Putri, W. A. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 9(1), 462–470.

Nurdewi, N. (2022). Implementasi personal branding Smart ASN perwujudan Bangga Melayani di Provinsi Maluku Utara. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 297–303.

Pardede, H. (2022). Analisis peran gereja sebagai penyelenggara keadilan sosial. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 5(2), 8.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2(1), 90–102.

Salsabila, N., dkk. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–13.

Sembiring, F. F. (2024). Data terpadu kesejahteraan sosial terhadap bantuan sosial bagi masyarakat miskin. *Journal of Social Science Research*, 6(1), 12.

Selviana, P. A., & Nalar, R. R. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 3(1), 1–8.

Sunardi, L., & Susilo, A. A. T. (2019). Sistem informasi dan verifikasi pengolahan data guru sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Ilmiah Betrik, 10(3), 150–160.

Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci keadilan sosial. *Journal of Information Systems and Management*, 2(1), 76–79.